

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- AP Parlindungan, 1993, *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung
- AP. Perlindungan, 1993, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
- Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali Sofwan Husein, 1997, *Konflik Pertanahan, Dimensi Keadilan dan Kepentingan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Bachsan Mustafa, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung
- BF Sihombing, 2005, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta
- CST Kansil, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- E Utrecht, 1957, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan keempat, Ichtiar Baru, Jakarta
- Erman Rajagukguk, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Individu dan Penguasa serta Kebijaksanaan Penguasa yang Tidak Dapat Digugat*, Makalah
- Ismail Sunny, 1979, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta
- Maria SW Sumardjono, 1994, *Reorientasi Kebijakan Pertanahan*, Kompas, September 1994
- \_\_\_\_\_, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung
- Prajudi Atmosudirdjo, 1966, *Hukum Administrasi Negara*, Grealia Indonesia, Jakarta
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- S. Nasution, 1992, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Toto Sumiyoto, 2002, “Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah” disampaikan dalam “Workshop Supervisi dan Evaluasi Pengaturan Kewenangan” yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri di Jakarta, 22-24 Oktober 2002
- Ujang Abdullah, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa*, Makalah, Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah Propinsi Lampung
- Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 1961

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1993

Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 Tentang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2006

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 366 tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 tahun 2013 Tentang Biaya Operasioanal dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pmbangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Berita Negara Nomor 648 Tahun 2015